

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amran Suadi dan Mardi candra, *Politik Hukum; perspektif hukum perdata dan pidana Islam serta ekonomi syari'ah*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- C.S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia; Buku I*, PT.Bina Aksara, Jakarta, 1984,.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- , *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- , *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah;filosofi, sejarah perkembangan dan problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.
- , *Desentralisasi asimetris Dalam NKRI*, Nusa Media, Bandung, 2014.
- Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007.

Sujamto, *Daerah Istimewa Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1988.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Undang - Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh

Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Qanun Provinsi Aceh Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam.

Qanun Provinsi Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam.

Qanun Provinsi Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Sebutan Nama Aceh dan Gelar Pejabat Pemerintahan Dalam Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Aceh.

C. Jurnal dan Makalah

Bagir Manan, *Perjalanan Pelaksanaan Syari'at Islam Di Aceh*, Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXXI No. 363, Februari 2016.

Delfina Gusman, *Karakteristik Putusan Mahkamah Syar'iyah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia* Makalah Penelitian, Universitas Andalas, November 2013.

Sirajuddin, *Format Kekuasaan Kehakiman Dalam Perubahan Lanjutan Konstitusi*, Jurnal Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Volume 20, No. 2, September 2012-Februari 2013.

Hasan Basri, *Kedudukan Syari'at Islam di Aceh Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Tahun XIII, No. 55, Desember 2011.

D. Media Masa dan Internet

Cik Basir, 03 April 2011, *Kedudukan, Kewenangan, dan prospek Mahkamah Syar'iyah dalam Judicial Power*, diakses dari <http://www.badilag.net/artikel/publikasi/artikel/kedudukan-kewenangan-dan-prospek-mahkamah-syariyah-sebagai-judicial-power-oleh-drs-cik-basir-sh-mhi-227>, pada tanggal 25 Oktober 2016.

Danial, *Qanun Jinayah Aceh dan Perlindungan HAM*, Dalam Jurnal Kajian Islam, Volume VI Nomor 1, diakses dari <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=49065&val=3911>, Pada tanggal 23 Maret 2017, Pukul 21.59 WIB .

Moh.Fauzi, 2012, *Problematika Yuridis Legislasi Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, diakses dari https://www.researchgate.net/profile/Jurnal_Ah-kam/publication/297714228_Problematika_Yuridis_Legislati_Syariat_Islam_di_Provinsi_Nanggroe_Aceh_Darussalam/links/56e1015308ae9b93f79c41f2.pdf?origin=publication_detail, pada tanggal 22 November 2016.

Hamdan Zoelva, 2013, *Aspek Konstitusionalitas Pengadilan Khusus di Indonesia*, diakses dari <http://www.komisiyudisial.go.id/files/Bunga%20Rampai/bunga-rampai-2013.pdf>, pada tanggal 20 November 2016.

Jimly Asshiddiqie, 2013, *Pengadilan Khusus*, diakses dari <http://jimly.com/pemikiran/makalah?page=4>, pada tanggal 20 November 2016.

Teuku Syaiful, *Penerapan Syari'at Islam Di Aceh Dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia*, diakses dari

<http://fhunilak.ac.id/downlot.php?file=Teuku%20Saiful%20Penerapan%20Syariat%20di%20Aceh.pdf>, pada tanggal 9 Desember 2016.

Zaki Ulya, *Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekonstruksi Syari'at Islam di Aceh*, dalam Jurnal Rechtsvinding (Media Pembinaan Hukum Nasional), Volume 5 Nomor 1, April 2016, diakses dari <http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART%209%20JRV%205.1%20WATERMARK.pdf>, Pada tanggal 9 Januari 2017, Pukul 00.43 WIB.

Delfina Gusman, *Kedudukan Mahkamah Syar'iyah Sebagai Salah Satu Badan Peradilan Di Indonesia*, diakses dari <http://fhuk.unand.ac.id/fhuk2012/index.php/in/kerjasama-hukum/menuartikeldosen-category/933-kedudukan-mahkamah-syariyah-sebagai-salah-satu-badan-peradilan-di-indonesia-article.html>, Pada tanggal 19 Januari 2017, Pukul 22.01 WIB.

